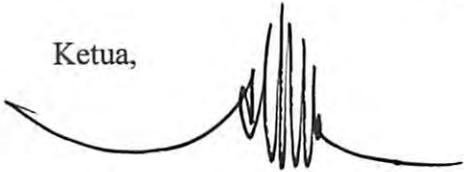


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rafika Mauliyana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

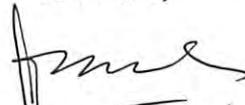
Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



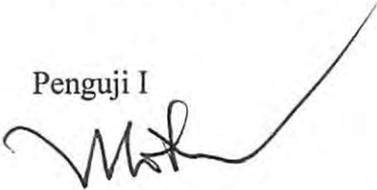
Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP.19504041988031003

Sekretaris,



Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi
NIP.197504232003122001

Penguji I



Dr. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji II



Abd. Basith, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing



Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, MA
NIP.19504041988031003

Surabaya, 03 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Dalam	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Transliterasi	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah 1	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11

A. Proses Nikah Sirri Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan	
Dalam Hukum Islam	58
B. Sebab-Sebab Kebiasaan Nikah Sirri Dalam Masyarakat	
Kampung Lebak Bangkalan Dalam Perspektif	
Hukum Islam	62
C. Nikah Sirri dalam Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan	
Dalam Hukum Islam	69
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Mata Pencaharian Penduduk	41
2. Sarana Pendidikan	41
3. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	42
4. Jumlah Sarana Peribadatan	43

warga negara Indonesia harus terikat dan tunduk pada aturan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang No. I Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, apabila akan melangsungkan perkawinan harus melibatkan pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan tersebut akan tercatat dalam daftar nikah dan tentunya perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Namun, meskipun perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang, dalam kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu yang melakukan perkawinan tanpa berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Mereka melakukan perkawinan berdasarkan kepercayaan serta adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Sebagaimana masyarakat kampung Lebak Bangkalan yang sudah terbiasa melakukan suatu bentuk pernikahan yang biasa kita kenal dengan istilah "nikah sirri". Pernikahan ini sejak masyarakat pada waktu itu belum bisa membaca dan menulis, tapi ada sebagian dari mereka yang bisa membaca dan menulis bahasa Arab.

Nikah sirri yang biasa dilakukan masyarakat kampung Lebak ada tiga macam. Pertama, Pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, maskawin, ijab qabul dengan mendatangkan seorang kyai untuk menikahnya yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan di KUA. Kedua, Pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan

perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul, walimah dengan mendatangkan seorang kyai untuk menikahkannya dan tidak dicatatkan di KUA. Ketiga, pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan dengan mendatangkan seorang kyai tanpa ada wali dan saksi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan di KUA. Bentuk pernikahan yang seperti inilah yang tetap bertahan dari zaman dahulu sampai saat ini dalam masyarakat kampung Lebak Bangkalan. Masyarakat kampung Lebak memiliki pemahaman bahwasanya nikah sirri ini adalah suatu pernikahan yang sah secara agama (Islam) meskipun tidak dicatatkan di KUA. Kebanyakan masyarakat kampung Lebak melakukan nikah sirri disebabkan karena kaum laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu biasanya istri kedua, ketiga dan keempatnya dinikahi secara sirri, dan untuk memperbaharui pernikahannya, ada juga yang sebagian orang tua khawatir apabila putra-putrinya yang sudah bertunangan tidak dinikahkan secara sirri terlebih dahulu khawatirnya akan terjerumus ke perzinahan. Selain itu juga, bagi mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah biasanya para orang tua menikahkan secara sirri. Sesungguhnya, masyarakat kampung Lebak telah mengetahui dampak negatif yang akan timbul dari nikah sirri akan tetapi bagi mereka nikah sirri merupakan jembatan dalam mengatasi problema-problema yang dialami masyarakat kampung Lebak. Maka dari itu, untuk lebih mengetahui tentang kebiasaan nikah sirri, serta faktor-faktor, dan tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak

Bangkalan, maka diperlukan penelitian. Sehingga, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di lapangan mengenai kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan?
2. Mengapa masyarakat kampung Lebak melakukan nikah sirri ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan ?

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat kampung Lebak Bangkalan. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dalam beberapa kajian karya ilmiah (skripsi) itu.

Pertama, kajian karya ilmiah (skripsi) Erika Novianti tentang Pencatatan pernikahan Anak Yang Lahir Dari Nikah Sirri (Studi kasus di KUA Gedangan Sidoarjo) yang intinya anak yang lahir dari nikah sirri dicatat sebagai anak sah di KUA Gedangan Sidoarjo, karena keinginan ayahnya atau kedua orang tuanya

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, serta memberikan suatu gambaran perkawinan tentang tinjauan hukum Islam mengenai perkawinan yang non prosedural.

3. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut bagi para peneliti dan pemerhati masalah-masalah nikah sirri di kemudian hari, lebih-lebih terhadap masalah yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis bahas ini, dan penemuan masalah baru yang perlu dikembangkan lagi.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat kampung Lebak Bangkalan”. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami judul penelitian tersebut maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang terkandung didalamnya, antara lain:

1. Hukum Islam yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada dalam uu No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.
2. Nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak, antara lain : Pertama, pernikahan yang dihadiri oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh kyai secara sembunyi-sembunyi. Kedua, Pernikahan yang dihadiri oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, ijab qabul, dan walimah yang dinikahkan oleh kyai. Ketiga, Pernikahan yang dihadiri oleh kedua

mempelai laki-laki dan perempuan, tanpa ada saksi dan wali dari perempuan yang dinikahkan secara sirri.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data tentang keadaan umum kampung Lebak Bangkalan.
- b. Data tentang kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.
- c. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

2. Sumber Data

Sumber data untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber asli (masyarakat) yang dilakukan dengan cara wawancara mengenai kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak dan sebab-sebab yang melatarbelakangi, antara lain:

1) Responden :

mengutip dari buku-buku atau kitab-kitab sebatas yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah nikah sirri.

BAB III Data secara murni tentang keadaan wilayah kampung Lebak Bangkalan, kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, serta tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

BAB IV Berisi analisa tentang kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, dan tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari jawaban pokok masalah yang diangkat yang telah dijawab melalui proses pembahasan pada bab IV, serta saran-saran yang diperlukan, yang diharapkan akan membawa keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.



b. Seorang pria dan seorang wanita

Mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini, menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.⁴

c. Sebagai suami istri

Mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

a. Asas- asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

⁴ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, Jakarta, Kencana, 2006, h.40

Adapun prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
- 2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang.
- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah perkawinan di bawah umur.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka, Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.⁵

b. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974

Seorang baru dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberti, 1990, h. 5

Dan kalau kita teliti di dalam UU 1/1974, maka syarat-syarat tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Syarat-syarat intern

Syarat intern ini merupakan syarat-syarat yang harus ada pada para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶

a. Syarat-syarat intern absolut

Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern yang absolut adalah syarat-syarat yang mengakibatkan bahwa pada umumnya orang tidak lagi berwenang untuk mengadakan perkawinan kalau syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Syarat-syarat intern absolut ini adalah:

- (1) Persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1).
- (2) Izin orang tua kalau calon mempelai belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat 2).
- (3) Pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

⁶ Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, Surabaya, Diantama, 2007, h. 25

Penyimpangan terhadap ketentuan ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan (pasal 17 ayat 1 dan 2).

- (4) Para pihak masing-masing tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal poligami yang diperbolehkan oleh undang-undang (pasal 9).
- (5) Bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya baru boleh kawin lagi setelah habis masa tunggu (pasal 11 ayat 1).

Untuk masa tunggu ini sesuai dengan ketentuan PP/1975 adalah:

- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 130 (seratus tiga puluh) hari;
- (2) Apabila putusnya perkawinan itu karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan sepuluh hari;
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antar janda

- (4) Sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman sususan.
- (5) Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal suami beristri lebih dari seseorang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
- (7) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 8 dan 10 UU).

2. Syarat-syarat ekstern

Yang dimaksud dengan syarat-syarat ekstern ini adalah merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern ini sesuai dengan yang ditunjuk oleh pasal 12 UU, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu adalah PP 9/1975. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri/suami terdahulu (pasal 5 PP 9/1975).⁸

- b. Pengumuman dari pegawai pencatat perkawinan, setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Di samping itu pegawai pencatat harus juga meneliti:
- c. Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila akte kelahiran atau surat kenal lahir tidak ada maka harus ada surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal-usul calon mempelai;
- d. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- e. Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Izin pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri;

⁸ Masjkur Anhari, *"Usaha-usaha memberikan kepastian hukum dalam perkawinan"*, Surabaya, Diantama, 2007, h. 30

- g. Dispensasi pengadilan/ pejabat yang ditunjuk, apabila salah atau kedua calon mempelai masih berumur di bawah batas minimal untuk melaksanakan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
 - h. Surat kematian istri atau suami terdahulu, atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - i. Izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya sebagai anggota angkatan bersenjata;
 - j. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- c. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974

Dalam fiqh tidak membahas mengenai pencatatan perkawinan, hal ini tentu berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa “ Tiap-

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada

sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.⁹

2. Nikah Sirri Menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa:

- 1) Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Ketentuan tersebut menegaskan akan adanya kedua hukum yakni hukum agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi, nikah sirri menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena pada umumnya nikah sirri adalah suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh aturan Islam, yaitu ada saksi, wali, maskawin, ijab, qabul, dan kedua calon mempelai tetapi tidak di catatkan di KUA.¹¹

⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", Jakarta, Kencana, 2004, h. 122

¹⁰ Pustaka Tinta Mas, *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya, 1997, h. 6

¹¹ Muhammad Thohir, *"Perempuan Dalam Sorotan"*, Surabaya, Sinar Terang, 2006, h.24

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya,

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki se ayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya se ayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni, sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat se ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali

bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Maka, hukum nikah sirri sebagai berikut :

- 1) Nikah sirri melanggar UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia.
- 2) Nikah sirri dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari'at yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- 3) Nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

yang memuat seperangkat baju, kerudung, tas, sandal, alat-alat kosmetik dan cincin pertunangan.

6. *Bhakar en-maen* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga gadis datang kepada keluarga jejak sebagai bentuk silaturahmi dan saling mengenal antara kedua keluarga dengan membawa sedikit oleh-oleh, kue, dan buah-buahan.
7. *Lamaran* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejak datang kepada keluarga gadis dengan membawa beras, gula, keta, kelapa, dan yang lainnya yang akan dipakai untuk pelaksanaan akad nikah.
8. *Kabin* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejak datang kepada keluarga gadis untuk melangsungkan akad nikah. Dalam proses akad nikah ini dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qabul (akad nikah) yang dinikahkan oleh PPN dari KUA setempat. Dan tahapan ini biasanya keluarga jejak membawa *ben-giben* seperti, ranjang, lemari, seperangkat perhiasan sebagai simbol bahwa sang jejak setelah resmi menjadi suaminya akan pindah kerumah sang istri.
9. *Mantan* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejak yang telah menjadi suami setelah melangsungkan akad nikah datang ke keluarga gadis yang telah menjadi istri untuk bersanding dipelaminan dalam bentuk acara resepsi pernikahan. Dalam Islam dikenal dengan istilah walimah al-ursh.

10. *Mantan en-maen* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga manten perempuan datang bersilat urrahi kepada keluarga manten laki-laki dengan membawa kue yang beraneka rupa dan buah-buahan.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan proses nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak yang tidak memakai proses adat perkawinan seperti diatas. Pelaksanaan nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak yaitu : Pertama, Pernikahan yang dihadiri oleh calon mempelai, wali, saksi, maskawin, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh seorang kyai di rumah mempelai wanita tanpa sepengetahuan orang banyak dan tidak dicatatkan dihadapan PPN. Biasanya proses ini diisi dengan selamatan biasa. Setelah upacara selesai biasanya tuan rumah memberi *slabet* 50.000 (lima puluh ribu) rupiah. Kedua, Pernikahan yang dihadiri oleh calon mempelai, wali, saksi, maskawin, ijab qabul dan walimah. Dinikahkan oleh seorang kyai di rumah mempelai wanita dengan mengundang kerabat, serta tetangga namun tidak dicatatkan dihadapan PPN. Proses ini diisi dengan pengajian dan tuan rumah memberikan *slabet* 50.000 (lima puluh ribu) rupiah. Ketiga, Pernikahan yang dihadiri oleh calon mempelai, maskawin, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh seorang kyai dalam suatu tempat tanpa sepengetahuan orang banyak dan tidak dicatatkan dihadapan PPN.

D. Sebab- Sebab Masyarakat Kampung Lebak Melakukan Nikah Sirri

1. Sebab Agama

Masyarakat kampung Lebak mempunyai pemahaman bahwasanya pernikahan yang mereka lakukan sudah sah secara agama (Islam) yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, maskawin, dan ijab qabul. Yang berbeda adalah tidak ada pencatatan perkawinan. Hal itu mereka peroleh dari keterangan kyai-kyai saat mereka belajar di pendidikan keagamaan pada zaman dahulu dan sampai sekarang masih membekas dalam ingatan mereka. Keberadaan kyai, ustad yang mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat disegani oleh masyarakat. Peran seorang kyai atau ustad yaitu mengarahkan masyarakat ke arah yang baik dan tentunya sikap kyai ini tidak memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Menurut fakta yang ada di lapangan kyai di Madura terkenal dengan mempunyai istri lebih dari satu. Hal ini, berbeda dengan kyai yang ada di kampung Lebak. Salah satu peran kyai di kampung Lebak yaitu sebagai fasilitator untuk menikahkan seseorang secara sirri. Alasan kyai mau menikahkan sirri semata-mata hanya mencegah mereka dari perbuatan zina.

2. Sebab Kebudayaan

Nikah sirri merupakan pernikahan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Lebak dari zaman dahulu yang sampai saat ini tetap bertahan. Kawin di usia muda yang masih banyak dalam masyarakat

kampung Lebak dari zaman dahulu sampai saat ini. Biasanya orang tua jika putra-putrinya sudah berumur belasan tahun mereka sudah di ikat dengan tali pertunangan dan cepat-cepat dinikahkan. Karena adat masyarakat kampung Lebak jika anak gadisnya sering dapat tamu teman lelakinya, biasanya pihak keluarga si gadis akan menanyakan kepada lelaki itu apakah ia serius atau hanya main-main. Jika, lelaki itu menjawab serius maka pihak keluarga si gadis meminta lelaki itu untuk membawa orang tuanya kerumah si gadis untuk melamarnya. Jika tidak maka pihak keluarga si gadis tidak akan mengizinkan lelaki itu main atau bertamu kerumahnya si gadis itu.

3. Sebab Sosial

Masyarakat kampung Lebak alat pengawasannya adalah masyarakat itu sendiri bukan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila seseorang itu berperilaku baik dalam bermasyarakat, maka seseorang itu akan di nilai baik oleh masyarakat. Dan, sebaliknya apabila seseorang berperilaku tercela atau menyimpang dari aturan yang ada di masyarakat maka ia akan mendapat sanksi yang berupa cibiran dari masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan seseorang yang sudah bertunangan, biasanya diberikan kebebasan oleh para orang tua (keluarga) untuk kemana saja berdua dan masyarakat pun menilai hal itu sudah lumrah. Bahkan, jika salah satu dari mereka menginap dikediaman salah satunya pihak orang tua mengizinkan dan masyarakat pun tidak merespon apapun karena mereka sudah terikat atau

bertunangan. Dari hal ini mereka merasa bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Dan pada akhirnya, mereka melakukan seks di luar nikah. Dan juga, bagi mereka yang salah pergaulan yang menjerumuskan ke lembah zina hingga hamil di luar nikah, jika tidak segera dinikahi maka akan mendapatkan sanksi berupa omongan-omongan atau cibiran-cibiran yang tidak baik dari masyarakat dan sampai kapan pun hal itu tetap diingat dan dikecam oleh masyarakat.

4. Sebab Pendidikan

Kebiasaan nikah sirri ini berawal pada saat tingkat pendidikan masyarakat pada waktu itu sangat rendah. Karena pada zaman dahulu masyarakat tidak mampu membaca dan menulis hanya sebagian dari mereka yang dapat membaca dan menulis dan itu pun bahasa Arab. Pendidikan formal pada waktu itu tidak ada hanya pendidikan keagamaan yang mereka pelajari. Dan meski, sampai pada saat ini pendidikan sangat tinggi dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMU (Sekolah Menengah Umum) dan sampai ke Perguruan Tinggi. Fakta di lapangan masih banyak pemuda-pemuda masyarakat kampung Lebak yang putus sekolah dan hanya melanjutkan ke tingkat SMP (Sekolah Menengah Pendidikan) saja. Alasan mereka putus sekolah biasanya kalau anak putri dinikahkan dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya kerjanya sebagai ibu rumah tangga saja. Untuk anak putra alasannya meskipun sekolah setinggi apapun

kalau tidak ada uang untuk masuk dalam instansi pekerjaan itu sia-sia dan nanti jatuhnya akan jadi nelayan juga. Karena mencari pekerjaan di Bangkalan meskipun mempunyai ijazah lulusan dari sekolah tinggi kalau tidak ada uang itu sulit juga. Sehingga dengan keadaan ini banyak juga masyarakat kampung Lebak putus sekolah. Jadi, dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi daya pikir dan pemahaman masyarakat akan tentang pernikahan sirri.

5. Sebab Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat kampung Lebak cukup beragam. Mulai dari Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Pedagang, Karyawan, tukang becak, pemulung dan sebagian masyarakat sebagai nelayan hingga pengangguran. Seorang tukang becak yang penghasilannya tidak menentu jika ramai paling banyak mereka dapatkan 20.000 (dua puluh) ribu rupiah, yang hanya cukup untuk makan saja. Seorang pemulung yang kesehariannya mengais barang-barang bekas dan dijualnya kepada tengkulak yang penghasilannya juga tidak menentu dan sangat minim dengan pakaian yang serba compang-camping dan kotor. Dan seorang nelayan yang kesehariannya melaut dengan menggunakan *sampán* (perahu kecil) yang penghasilannya sesuai dengan tangkapan ikannya jika tidak mendapatkan ikan maka tinggal lelahnya saja. Apalagi seorang pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Sebab inilah dari sebagian masyarakat yang kesulitan ekonomi melakukan nikah

B. Faktor-Faktor Penyebab Kebiasaan Nikah Sirri Dalam Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Hukum Islam

Masyarakat kampung Lebak mempunyai alasan-alasan tersendiri tentang kebiasaan mereka melakukan nikah sirri. Pertama, sebab agama. Masyarakat kampung Lebak mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat berpengaruh terhadap sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Pemahaman masyarakat tentang nikah sirri bahwasanya pernikahan sirri ini sama dengan pernikahan pada umumnya hanya pernikahan sirri ini tidak dicatatkan di KUA. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang salah dan memberikan peluang-peluang bagi masyarakat untuk mengikuti bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Memang benar bahwa pernikahan sirri rukun dan syarat perkawinannya menurut fiqh munakahat sudah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai, wali, saksi, maskawin, dan ijab qabul. Akan tetapi menurut UU No. 1 tahun 1974 syarat ekstemnya belum terpenuhi.

Yang dimaksud dengan syarat ekstern yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan yaitu pemberitahuan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan untuk masa depannya dalam membina rumah tangga.

Kelima, faktor ingin menikah lagi. Dalam penelitian yang kami peroleh di masyarakat kampung Lebak nikah sirri ini merupakan jalan satu-satunya bagi mereka (pelaku nikah sirri) untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang tanpa sepengetahuan istri yang dinikahkan secara sah. Mereka dengan mudahnya menikahi beberapa perempuan untuk menyalurkan kepuasan batinnya dan juga dengan mudahnya mereka meninggalkan perempuan-perempuan itu kapan pun yang mereka inginkan. Tetapi, biasanya orang yang mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-laki yang berpenghasilan lebih dari cukup. Namun, dalam penelitian yang kami peroleh justru masyarakat miskin, meski ada beberapa dari masyarakat kaya.

Padahal, menurut KHI tentang seseorang yang ingin beristri lebih dari satu syaratnya yaitu : (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. (4) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (5) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (6)

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Memang perkawinan sirri dalam masyarakat kampung Lebak menurut fiqh munakahat dianggap sudah sah.

Namun, tidak demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 itu berbunyi” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula dengan ketentuan yang ada pada KHI dalam pasal 5 menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh PPN. Dan selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Muhammad Thohir, “ *Perempuan Dalam Sorotan*”, Surabaya, Sinar Terang, 2006
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 6, Bandung, PT Alma’arif, 1980
- Sidi Gazalba, “*Menghadapi Soal-soal Perkawinan*”, Jakarta, Pustaka Antara, 1975
- Siti Fatimah, *Skripsi: Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Surabaya, 2003
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberti, 1990
- Titik Triwulan Tutik, “*Poligami Perspektif Perikatan Nikah*”, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007
- Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1997
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Wipress, 2007
- UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta, Paradnya Paramita, 1977